

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi Indonesia mengalami kemunduran saat terjadi krisis ekonomi dan politik tahun 1997/1998 yang akhirnya melahirkan gerakan reformasi yang membawa perubahan besar dan mendasar terhadap sistem tatakelola pemerintahan. Dalam pandangan Mardiasmo (2004:3) peristiwa tersebut telah memberi “berkah tersembunyi” (*blessing in disguised*) bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia dimasa mendatang. Karena krisis yang dialami telah membuka jalan bergulirnya reformasi total diseluruh aspek kehidupan. Tema sentral reformasi tersebut adalah mewujudkan masyarakat madani, terciptanya *good governance*, dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan¹. Sistem pemerintahan yang semula sentralistik berubah menjadi otonomi (desentralisasi) dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengurus pemerintahan dan mengelola pembangunan di daerahnya. Hal ini dilakukan untuk lebih mendorong dan meningkatkan aktivitas pembangunan di seluruh daerah sesuai dengan potensi dan permasalahan daerah bersangkutan serta aspirasi dan keinginan masyarakat setempat (Sjafrizal, 2012:272).

Ditetapkannya dua kebijakan tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan antithesis atas diterapkannya sistem pemerintahan sentralistik di bawah pemerintahan Orde Baru. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan prinsip otonomi daerah yang dimaknai

¹ Pandangan lain, reformasi telah memunculkan sikap keterbukaan dan fleksibilitas sistem politik dan kelembagaan sosial, sehingga mempermudah proses pengembangan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk pembaruan paradigma diberbagai bidang kehidupan.

sebagai pelimpahan berbagai kewenangan kepada pemerintah daerah dan *setting-up* proses-proses politik di daerah. Berikutnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 (direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan prinsip desentralisasi fiskal. Inti desentralisasi fiskal adalah dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk menjamin ketersediaan sumber-sumber fiskal bagi pemerintah daerah dalam bentuk Dana Perimbangan (*block grant*). Daerah juga diberi kewenangan untuk menambah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku (Sjafrizal, 2012:272). Kedua kebijakan publik tersebut merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah pusat untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat di daerah dalam rangka membangun perekonomian daerah, serta memiliki makna yang sangat penting karena adanya pelimpahan urusan dan sumber pembiayaan yang sebelumnya merupakan tanggungjawab pemerintah pusat. Substansi lain Undang-Undang tersebut yang efektif berlaku sejak Januari 2001 berfokus pada desentralisasi administrasi dan politik termasuk referensi pedoman pendelegasian wewenang pertanggungjawaban pengeluaran pemerintah daerah. Dalam kaitan ini, Bank Dunia (2003) memberikan istilah *The Indonesia's 2001 Big Bang Decentralization* karena hanya dalam "semalam" Indonesia berubah dari negara yang sangat sentralistik menjadi negara yang sangat desentralistik².

Prinsip dasar desentralisasi fiskal adalah *money follows functions* (uang mengikuti kewenangan). Artinya, jika kewenangan dilimpahkan ke daerah maka uang untuk mengelola kewenanganpun harus dilimpahkan ke daerah. Dalam pengertian lain *money follows function* menurut Yudhaningsih (2010), yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah. Sedangkan tujuan awal desentralisasi fiskal adalah mengurangi

² Rochana, 2013. Jurnal *Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah pada Era Otonomi Daerah di Indonesia*, hal 2.

kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan kesenjangan fiskal antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*). Berkaitan dengan aspek keuangan (*financial*) terdapat empat komponen utama dari desentralisasi fiskal, yaitu (1) tugas pengeluaran (*expenditure assignment*), (2) tugas pendapatan (*revenue assignment*), (3) sistem dana perimbangan (*intergovernmental system*), dan (4) penganggaran dan monitoring keuangan (*budgeting and fiscal monitoring*).

Saat ini hampir semua negara-negara di dunia ketiga menganut sistem ekonomi campuran (*mixed economic system*) yaitu suatu sistem dimana sektor pemerintah dan sektor swasta sama-sama berpartisipasi dalam kepemilikan dan penggunaan sumber-sumber daya (Todaro dan Smitih, 2004:51). Untuk itu, ditetapkannya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong kemajuan pembangunan ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan antar wilayah. Perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dihubungkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equality*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat (Kuncoro, 2004). Ketidakmampuan daerah dalam mengalokasikan dana secara efektif dan efisien yang tidak didukung oleh sistem administratif yang baik dan rendahnya kekuatan redistribusi sumber daya antar daerah maka akan menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah dan dapat meningkatkan ketimpangan regional³.

Rochana (2013)⁴ mengatakan bahwa dibalik otonomi daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga berpotensi meningkatkan disparitas pendapatan regional jika tidak dikelola dengan baik (Prud'homme, 1995; Lessmann, 2006; Shah, 2006). Hal ini karena dalam sistem desentralisasi, setiap pemerintah daerah mengelola anggaran dengan hanya mempertimbangkan

³ Kurniawan dan Sugiyanto (2013) dalam <http://ejournal-s1.undip.ac/index.php/jme>.

⁴ Op.cit, hal 2.

kesejahteraan warganya tanpa berkewajiban memperhatikan warga diluar wilayahnya. Berdasarkan hasil penelitiannya menemukan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia membawa efek samping disparitas pendapatan antar wilayah. Perbedaan penerimaan anggaran yang semakin besar akan berdampak pada perbedaan pengeluaran. Selanjutnya, perbedaan pengeluaran dapat menyebabkan perbedaan output antar daerah. Hal ini karena pengeluaran pemerintah merupakan salah satu variabel penentu output.

Untuk melihat keragaman anggaran dalam APBD di wilayah Provinsi Banten, penulis menghitung indeks ketimpangan regional berdasarkan Indeks Williamson komponen penerimaan dan belanja pembangunan per kapita selama tahun 2001-2013, seperti yang disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan
dan Belanja Pembangunan (Indeks Williamson) Total Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2001-2013

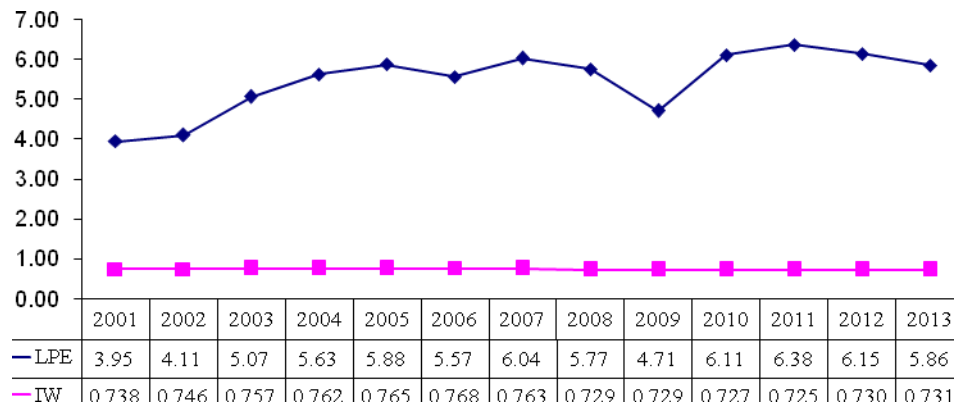
| Tahun | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Dana Perimbangan | Belanja Pembangunan |
|-------|------------------------------|------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2001 | 0,637 | 0,229 | 0,310 |
| 2002 | 0,694 | 0,276 | 0,532 |
| 2003 | 0,688 | 0,320 | 0,440 |
| 2004 | 0,678 | 0,222 | 0,353 |
| 2005 | 0,674 | 0,288 | 0,394 |
| 2006 | 0,648 | 0,326 | 0,367 |
| 2007 | 0,476 | 0,306 | 0,396 |
| 2008 | 0,444 | 0,345 | 0,455 |
| 2009 | 0,699 | 0,365 | 0,406 |
| 2010 | 0,558 | 0,255 | 0,347 |
| 2011 | 0,554 | 0,259 | 0,228 |
| 2012 | 0,572 | 0,260 | 0,254 |
| 2013 | 0,512 | 0,269 | 0,232 |

Sumber : BPS Provinsi Banten/Kabupaten/Kota
dan DJPK Kemenkeu RI (Data Diolah)

Indeks Williamson Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan variasi ketimpangan yang cukup tinggi bergerak berfluktuasi pada kisaran 0,637-0,512, sedangkan Dana Perimbangan bergerak pada kisaran 0,229-0,269 namun termasuk pada tingkat ketimpangan rendah. Sama halnya dengan ketimpangan belanja pembangunan yang memperlihatkan fluktuasi dari tahun ke tahun dan berada pada tingkat ketimpangan relatif rendah sampai sedang dengan titik awal pada nilai 0,310 tahun 2001 dan tertinggi sebesar 0,532 pada tahun 2002, akan tetapi sejak tahun 2008 terjadi penurunan yang konsisten dari 0,455 menjadi 0,232 pada tahun 2013. Artinya sejak tahun 2008 sampai 2013 porsi belanja pembangunan antar kabupaten/kota relatif semakin merata.

Belanja pembangunan untuk pengadaan infrastruktur fisik maupun non fisik peranannya sangat penting karena merupakan instrumen untuk menggerakkan perekonomian daerah. Infrastruktur menjadi penentu kelancaran dan akselerasi pembangunan. Semakin cepat dan besar pembangunan ekonomi yang hendak digerakan semakin banyak fasilitas infrastruktur yang diperlukan. Menurut Basri dan Munandar (2009:129) infrastruktur memiliki sifat eksternalitas positif yang tinggi, artinya pengadaan suatu infrastruktur akan sangat mempengaruhi secara positif perkembangan berbagai sektor ekonomi lainnya. Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur mengakibatkan pemanfaatan potensi dan sumber daya ekonomi menjadi tidak optimal bahkan sulit berkembang hingga ke taraf yang diharapkan. Di negara manapun di dunia, infrastruktur merupakan tanggungjawab pemerintah sehingga besar kecilnya anggaran infrastruktur yang dikeluarkan dapat langsung menunjukan seberapa banyak kemajuan yang akan diciptakan.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Propinsi Banten mampu memberi dampak terhadap peningkatan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, yaitu dengan laju pertumbuhan ekonomi yang selalu tumbuh positif meskipun mengalami fluktuasi tiap tahunnya pada kisaran 3,95 persen sampai 6,38 persen selama periode tahun 2001-2013, seperti disajikan pada gambar 1.1.



Gambar 1.1
 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten (LPE) dan Ketimpangan Pendapatan Regional (IW) antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2001-2013

Indeks Williamson umumnya digunakan untuk melihat ukuran ketimpangan pendapatan regional. Indeks ini berada pada kisaran 0 dan 1, dengan pengertian bila indeks mendekati 1 (satu) dikatakan sangat timpang dan bila mendekati 0 (nol) berarti semakin merata⁵. Perhitungan Indeks Williamson menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita atau untuk tingkat regional digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan. Indeks Williamson memperlihatkan ketimpangan pendapatan regional di wilayah Provinsi Banten selama periode tahun 2001-2013 tergolong tinggi, yaitu pada kisaran angka rata-rata 0,744. Pada tahun 2001-2006 nilai indeks bergerak naik dari 0,738 menjadi 0,768, tetapi relatif menurun menjadi 0,731 pada tahun 2013.

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal tidak serta merta menjadikan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten mengalami peningkatan laju pertumbuhan PDRB secara merata. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan kepemilikan sumber daya alam atau faktor *endowments*,

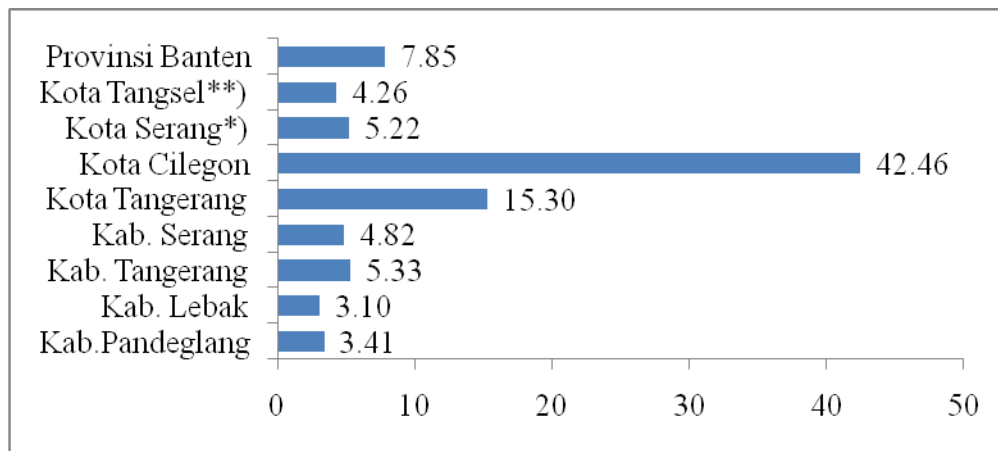
⁵ Klasifikasi tingkat ketimpangan berdasarkan Indeks Williamson (IW) $\leq 0,39$ ketimpangan rendah; 0,40-0,69 ketimpangan sedang; $\geq 0,70$ ketimpangan tinggi.

letak geografis dan kebijakan pemerintah daerah. Kondisi *endowments factor* setiap daerah yang bervariasi berdampak terhadap perbedaan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Terjadinya migrasi tenaga kerja dan pergerakan modal kearah *core*, serta tidak berjalannya mekanisme *trickle down effect* akan berdampak meningkatkan ketimpangan pendapatan antar daerah (Hirschman, 1970 dalam Siagian, 2010).

Ketimpangan pendapatan regional (*regional income inequality*) timbul karena tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Ketimpangan berarti suatu gambaran terhadap kondisi yang tidak homogen. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan wilayah terbelakang. Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim menyebabkan inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro dan Smith, 2004:235). Dalam konteks ketatanegaraan, ketimpangan akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang kemudian akan mengancam stabilitas sosial dan politik suatu negara. Maka dari itu, ketimpangan harus diatasi oleh pemerintah dengan mendorong daerah yang terbelakang untuk mampu mengejar ketertinggalan perekonomiannya terhadap daerah yang sudah maju.

Myrdal dalam Jhingan (2008:212-213) menyebutkan ketimpangan wilayah juga berkaitan dengan sistem ekonomi kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lainnya tetap terlantar. Penyebab gejala ini adalah peranan bebas kekuatan pasar yang cenderung memperlebar kesenjangan regional. Ketidakmerataan pembangunan yang mengakibatkan kesenjangan ini disebabkan karena adanya dampak hisap atau dampak balik (*backwash effect*) yang lebih besar dibandingkan dengan dampak sebarnya (*spread effect*).

Kemampuan pemerintah daerah dalam membangun masing-masing daerahnya tentu berbeda-beda mengingat potensi yang dimiliki setiap daerah berbeda. Daerah yang memiliki potensi ekonomi besar cenderung memiliki pendapatan daerah dan PDRB per kapita yang besar, dan sebaliknya. Gambaran perbedaan ini dapat diamati seperti yang direpresentasikan di Provinsi Banten seperti dapat dilihat pada gambar 2.1.



Sumber : BPS Provinsi Banten.

*) Kota Serang data tahun 2007-2013

**) Kota Tangsel (Tangerang Selatan) data tahun 2008-2013

Gambar 1.2
Rata-rata PDRB Riil per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2001-2013 (Juta Rupiah)

Kota Cilegon dan Kota Tangerang memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi dibanding kabupaten/kota lain. PDRB per kapita Kota Cilegon mencapai 42,46 juta rupiah per tahun disusul Kota Tangerang 15,30 juta rupiah. Kedua daerah tersebut nilai tambah brutonya dominan disumbang oleh aktivitas sektor industri pengolahan. Sebaliknya Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang memiliki PDRB per kapita yang lebih rendah, yaitu 3,10 juta rupiah dan 3,41 juta rupiah. Bahkan nilai PDRB per kapita kedua kabupaten tersebut lebih rendah dibandingkan dua daerah kota yang baru terbentuk, yaitu Kota Serang (terbentuk tahun 2007) yang besarnya 5,22 juta rupiah dan Kota

Tangerang Selatan (terbentuk tahun 2008) mampu mencatatkan sebesar 4,26 juta rupiah. Kedua kota ini dilihat dari struktur PDRB-nya dominan disumbang oleh sektor perdagangan dan jasa-jasa. Sedangkan Kabupaten Lebak dan Pandeglang dominan bersumber dari sektor pertanian dan perdagangan. Tingginya pendapatan per kapita Kota Cilegon dapat menjadi indikasi memberi pengaruh positif meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun disisi lain memberi dampak terhadap tingginya ketimpangan pendapatan regional.

Kebijakan desentralisasi fiskal dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi alokasi sumber daya dan mengurangi ketimpangan pendapatan regional. Hal ini karena pemerintah daerah lebih mengenal potensi keuangan daerahnya dibandingkan pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan dan penyediaan barang-barang publik secara optimal. Esensi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal setidaknya mempunyai tiga pertimbangan. *Pertama*, pertumbuhan dilihat sebagai sesuatu yang objektif dari desentralisasi fiskal dan efisiensi dalam alokasi sumberdaya sektor publik. *Kedua*, secara eksplisit pemerintah berusaha mengadopsi berbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita. *Ketiga*, pertumbuhan pendapatan per kapita relatif lebih mudah untuk diukur dan diinterpretasikan dibanding indikator-indikator lainnya (Suparno, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Akai-Sakata (2005) dan Lessmann (2006) menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan regional diantaranya pertumbuhan ekonomi, aglomerasi, dan jumlah orang yang bekerja. Aglomerasi merupakan suatu pengelompokan kegiatan ekonomi yang umumnya bersifat homogen disuatu tempat. Menurut Marshall, aglomerasi muncul ketika sebuah industri memilih lokasi untuk kegiatan produksinya yang memungkinkan dapat berlangsung dalam jangka panjang sehingga masyarakat akan banyak memperoleh keuntungan apabila mengikuti tindakan mendirikan usaha disekitar lokasi tersebut (Kuncoro, 2004).

Aglomerasi atau konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah akan menyebabkan daerah tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan cepat. Sebaliknya bagi daerah yang memiliki tingkat aglomerasi rendah akan menjadi semakin terbelakang. Konsentrasi kegiatan ekonomi bagi suatu industri akan mampu memacu pembangunan di suatu daerah melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menurut Williamson (1965) dalam Delis (2009) disebabkan karena pertumbuhan tidak selalu terjadi secara merata pada semua wilayah. Pada tahap awal, proses pembangunan cenderung terkonsentrasi dan terpolarisasi pada area pusat suatu negara atau wilayah. Penyebaran ke wilayah pinggiran dan sektor-sektor yang relatif lemah hanya terjadi secara subsequent. Konsekuensi dari keberadaan dua bentuk kecepatan pembangunan yang berbeda tersebut adalah melebarnya jurang ketimpangan wilayah pada fase awal pembangunan ekonomi, namun kemudian akan berkurang ketika pendapatan nasional atau wilayah mencapai tingkat tertentu. Heterogenitas karakteristik potensi ekonomi suatu wilayah dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah atau antar sektor ekonomi di suatu daerah. Ketimpangan antar daerah penting untuk diperhatikan karena gravitasi aktivitas ekonomi secara geografis cenderung terkonsentrasi pada kawasan perkotaan dan daerah yang sudah maju. Hal ini mencerminkan adanya trend meningkatnya pergerakan konsentrasi spasial kegiatan ekonomi (*agglomeration economic*) pada daerah-daerah tertentu.

Keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan regional sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro daerah. Mengingat pentingnya pertumbuhan ekonomi daerah dan permasalahan ketimpangan pendapatan regional maka penyusun mengajukan judul penelitian sebagai berikut: **“Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Regional di Provinsi Banten”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dijelaskan terdapatnya perbedaan potensi ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Banten. Perbedaan tersebut antara lain mengenai potensi sumber daya alam, aktivitas perekonomian, sumber daya manusia, dan kekuatan anggaran yang dimiliki. Perbedaan potensi daerah dapat menyebabkan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi dan tingginya ketimpangan pendapatan regional (antar kabupaten/kota). Padahal esensi pembangunan adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan hasil-hasilnya. Perpaduan dari kedua arah kebijakan ini dalam kajian ekonomi disebut konsep *growth with distribution strategy*. Strategi pembangunan untuk pertumbuhan tanpa memperhatikan pemerataan akan mengarah pada kepincangan. Sebaliknya, pemerataan tanpa pertumbuhan akan mengakibatkan kelambatan atau ketertinggalan (Abidin, 2012:67). Adanya ketimpangan menunjukkan derajat permasalahan pembangunan daerah dalam suatu negara. Ketimpangan antar daerah tidak selalu sama sepanjang waktu, tetapi berubah mengikuti suatu trend yang dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pembangunan nasional dan daerah dalam suatu negara (Abidin, 2012:123). Berdasarkan uraian latar belakang dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan fenomena pembangunan, yaitu :

1. Masih rendah dan belum meratanya pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Banten.
2. Tingginya Ketimpangan Pendapatan regional di Provinsi Banten.

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah adalah upaya untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana saja yang akan dimasukkan ke dalam lingkup masalah penelitian. Dengan demikian, pembatasan akan membuat masalah penelitian menjadi lebih fokus dan jelas sehingga rumusan masalah dapat dibuat dengan jelas pula.

Berdasarkan masalah yang teridentifikasi maka penelitian ini dibatasi pada dua variabel yang diteliti sebagai masalah utama yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan regional di Provinsi Banten sebagai dampak kebijakan desentralisasi fiskal. Pembatasan ruang lingkup penelitian ditetapkan agar dalam penelitian ini lebih fokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya sehingga tujuan penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Menyadari kemungkinan tidak fokusnya dalam pelaksanaan penelitian yang dikarenakan melebarnya pembahasan masalah maka ditetapkan batasan, yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten pada periode tahun 2001-2013.
2. Ketimpangan pendapatan regional di Provinsi Banten pada periode tahun 2001-2013.

1.4. Rumusan Masalah

Desentralisasi fiskal merupakan suatu produk kebijakan pemerintah sebagai bentuk pengalihan kewenangan pengelolaan sektor fiskal daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri melalui pengelolaan sumber-sumber penerimaan yang dimilikinya serta memenuhi kebutuhan belanja dan pembiayaan. Untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan yang dapat digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dengan keadaan di atas maka dapat dirumuskan masalah utama yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Dengan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan daerah. Melalui belanja daerah yang bersumber dari penerimaan daerah seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terkait hal ini maka muncul pertanyaan penelitian “apakah dampak kebijakan desentralisasi fiskal secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten pada periode Tahun 2001 – 2013 ?”.

2. Terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal muncul fenomena dimana pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat setiap tahunnya namun di sisi lain terjadi ketimpangan pendapatan regional. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang muncul adalah “apakah kebijakan desentralisasi fiskal secara signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan regional di Provinsi Banten pada periode Tahun 2001-2013 ?”.

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.
2. Menganalisis dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan regional di Provinsi Banten.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis adalah memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan teori dan aplikasi ilmu administrasi publik, kebijakan desentralisasi fiskal dan ekonomi publik.
2. Manfaat Praktis adalah sebagai informasi dan masukan kepada pemerintah Provinsi Banten untuk bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan menyangkut pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemerataan pendapatan regional.